

Pendidikan Islam dan Humanitas

Mohammad Liwa Irrubai

Prodi Pendidikan IPS FTK Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
liwairrubai@yahoo.com

Abstract: *Today, the human problem in social life concerning education is growing more complex; many new ideas emerge as the level of human intellectuality grows. This paper will reveal the current issue of education in Indonesia and discuss ideas from the concept of liberal education. The basic issue of education criticized by liberal education is that education today focuses more on the needs of society than the educational objectives themselves. Education as a tool to transfer science, values, and agents of social change is seen as one alternative solution in the framework of improving people's lives. The education in which values are embodied is one of the efforts offered by genuine liberal education, aimed at giving us the habits, ideas and techniques necessary to continue our own education. Humans have the ability to learn continuously throughout life so that we can prepare ourselves to study and again as long as we are alive.*

Keywords: *Development and Educational Problems Today, Educational Objectives, and Liberal Education.*

Pendahuluan

Kemerdekaan bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Harapan ini walaupun sudah lama dicanangkan, namun belum juga terwujud sampai sekarang. Keadaan lebih parah lagi dengan timbulnya gejala-gejala salah urus (*mismanagement*).¹ Akibatnya pada bidang pendidikan fasilitasnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Lagi pula politik dan usaha-usaha pendidikan tidak berhasil menjadikan sektor pendidikan sebagai faktor penunjang bagi suatu pendidikan. Perkembangan selanjutnya pendidikan hanya mengakibatkan benih-benih pengangguran. Lahirnya Orde Baru (Orba) memungkinkan pendobrakan salah urus itu dalam segala bidang juga dalam pendidikan. Bagaimana Orde Baru dalam mengobarkan pendidikan, kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Bagaimana keberadaan pendidikan agama Islam dalam menghadapi dikotomi pendidikan.

Runtuhnya rezim Sukarno yang dibarengi tumbanganya Orde Lama (Orla) ditandai tumpasnya gerakan sparatis G30S/PKI, maka bangsa Indonesia memasuki kehidupan baru. Tekad Orde Baru yang ditempuh dalam menata negara ialah dengan menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, memperjuangkan adanya suatu masyarakat adil dan makmur mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.² Gerakan Orde Baru yang dilakukan tentara dan organisasi kepemudaan, baik itu KAMMI, KAPRI pada tahun 1966 melakukan demonstrasi di jalan-jalan awalnya mereka memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan dan harga yang melambung. Korupsi yang merajalela dan berkembang menjadi protes terhadap Sukarno, kemudian pada Maret 1966 Sukarno didesak untuk menandatangani atas surat presiden yang isinya memerintahkan Suharto untuk mengambil tindakan

¹ Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: Ilmu, 1959), 230.

² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 81.

yang perlu untuk keselamatan dan stabilitas negara dan pemerintah melindungi Sukarno sebagai presiden, panglima tertinggi, panglima besar revolusioner, dan mandataris MPR.

Dewasa ini, persoalan manusia dalam kehidupan sosial yang menyangkut pendidikan berkembang semakin kompleks, banyak ide-ide baru bermunculan berkaitan dengan semakin berkembangnya tingkat keintelektualan manusia. Wajah dunia akan berubah pula, jika tingkat peradaban manusia bertambah. Tak pelak manusia berlomba-lomba untuk mencapai kualitas tertinggi dalam hidupnya, dan pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa sebuah peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak metode, sistem dan teori yang memperkenalkan kepada manusia dalam hal pendidikan, di antaranya sistem pendidikan liberal sejati, sistem pendidikan ini berusaha menguak lebih lanjut tentang begitu pentingnya kebebasan seseorang dalam mencari jati dirinya. Pendidikan di sini hanya bertugas memberi bimbingan dan pemahaman tentang nilai-nilai dasar saja, sementara perkembangan pencarian jati dirinya ditentukan sendiri. Pendidik hanya memberikan kerangka dasar saja, sementara murid (peserta didik) mengembangkannya sesuai kehendaknya sendiri.

Pendidikan dalam Perspektif

Pendidikan banyak diartikan sebagai upaya sadar dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pandangan hidup, sikap hidup maupun keterampilan yang berorientasi pada terbentuknya kepribadian.³ Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa pendidikan merupakan kesadaran akan begitu pentingnya seseorang untuk mencari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya agamis maupun sifatnya umum (pada dasarnya tidak boleh mendikotomikan tentang ilmu, namun di sini kami bertujuan untuk mempermudah pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan). Dan setelah kita paham betul tentang ilmu pengetahuan, maka selanjutnya

³ Amin Syukur, et.al., *Metodologi Studi Islam* (Semarang: Gunung Jati, 1998), 195.

kita mentransferkan pemahaman kita kepada orang lain (mengamalkan) agar supaya nilai-nilai kemanusiaan akan selalu terjaga dan terpelihara di muka bumi. Dunia kini dan masa depan adalah dunia yang dikuasai sains dan teknologi. Mereka yang memiliki keduanya akan menguasai dunia. Bila (meminjam istilah Marx) sains dan teknologi merupakan infrastruktur, akan menentukan suprastruktur dunia internasional, termasuk kebudayaan, moral, hukum, bahkan agama.⁴

Istilah Marx ini memberi pengertian dan kritik serta motivasi kepada kita sebagai bagian dari dunia ini, untuk mencari, mempelajari serta memahami tentang arti penting dari sains dan teknologi. Marx ini juga memberikan kontribusi wawasan kepada kita tentang begitu besar peran dan pengaruh sains dan teknologi terhadap wajah dunia. Sementara liberal menurut bahasa, dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan. Akar dari kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan putusan tindakannya sendiri secara sadar dan bertanggung jawab, inilah yang kemudian disebut dengan kebebasan eksistensial yang berakar pada rohani manusia sebagai kendali manusia terhadap batinnya, pikiran dan kehendak-kehendaknya.⁵ Kebebasan (liberal) sesuai dengan pengertian di atas mempunyai pengertian bahwa semua manusia adalah bebas untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendak dirinya, namun dalam kebebasan berbuat itu manusia sadar betul bahwa perbuatannya itu akhirnya akan di minta pertanggungjawabannya. Menurut Franz Magnis Suseno, ada perbedaan antara kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya terdapat dalam kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, bersifat positif. Berarti tidak menekankan “bebas dari” melainkan “bebas untuk”. Sedangkan kebebasan sosial merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial, kebebasan biasanya dihayati dalam hubungan dorongan manusia.⁶

⁴ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah Kampus* (Bandung, Mizan, 1998), 154.

⁵ Zainal Adzvar, “Kebebasan Manusia Menurut Stoa dan Islam,” *Idea*, Edisi 16/X/2001, 27.

⁶ *Ibid.*

Dalam bidang pendidikan, unsur kebebasan untuk memilih, memutuskan dan melaksanakan keputusan bagi seorang murid merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan, ini dimaksud bahwa dalam pendidikan tidak ada sistem objek, yang ada hanyalah sistem subjek. Murid (siswa) bukanlah merupakan objek dalam pendidikan, yang bebas untuk dijadikan apa saja oleh gurunya, siswa adalah sama kedudukannya dengan guru, yaitu sebagai subjek (pelaku) pendidikan yang sama-sama mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya sehingga sudah sepantasnya bahwa keduanya mempunyai hubungan yang signifikan dalam tujuan pendidikan, yaitu terciptanya kualitas manusia yang mampu dan mau memahami manusia seperti manusia.

Dari kedua pengertian di atas (pendidikan dan liberal) dapat kita pahami bahwa pendidikan liberal sejati adalah pendidikan yang berusaha untuk memperbaiki manusia melalui penanaman nilai-nilai, suatu sistem yang menyangkal pula keberadaan nilai-nilai berarti menyangkal pula kemungkinan pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengetahui kebaikan dalam tatanan. Ada jenjang dalam nilai-nilai, tugas pendidikan adalah membantu kita memahaminya, memantapkannya, dan hidup dengannya.⁷

Keberadaan Pendidikan Agama

Pada ketetapan MPR, Nomor XXVII/MPRS/1996 Bab II Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan Nasional Indonesia ialah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki UUD 1945. Pada Pasal 4 disebutkan tentang isi pendidikan,⁸ yaitu:

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.

⁷ Robert Magnard Hutehins, *Pendidikan Liberal Sejati, dalam Menggugat Pendidikan Fundamintalis Konservatif Liberal Anarkis*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 112-113.

⁸ *Ibid.*, 83.

2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dalam sidang yang dilakukan MPR menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selain ditegaskan masalah pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib. Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti ada keserasian dan keselarasan antara pembangunan bidang rohani dan pembangunan bidang agama.⁹ Rumusan mengenai pendidikan nasional senantiasa termuat dan diterapkan di GBHN, yaitu mulai 1978-1993 dan rumusan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa.¹⁰ Selain itu, pendidikan Nasional juga mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, serta memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan Nasional yang tangguh.

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran

⁹ Zuhairini, et.al., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 156.

¹⁰ Depag RI, *Himpunan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, Dirjen Binbaga Islam, 1991), 4.

rakyat.¹¹ Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjwai kehidupan bangsa dan negara. Kalau dirunut ke belakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik. Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan. Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar, namun itu semua hanya bahasa kiasan belaka. Menurut Abdurrahman Mas'ud, undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang masih terdapat dikotomi pendidikan.¹² Kalau dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal perkawinan ilmu agama dan umum justru akan menciptakan kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.

Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah.
2. Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitik-beratkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif.
3. Adanya dikotomi pendidikan, heterogenitas pengetahuan, dan penghayatan peserta didik.
4. Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang.
5. Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan

¹¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 133.

¹² Majalah Rindang, "Pesantren Masuk Undang-Undang," *Majalah Bulanan Rindang*, Edisi XXVII (2002), 12.

kehidupan kurang.

6. Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam.

Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional

Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU Nomor 2 Tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi “lahan subur” tempat persemaian generasi baru. Artinya, pendidikan Islam harus mampu:

1. Membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu.
2. Membangkitkan indra dan perasaan anak didik sebagai sarana berpikir.
3. Membekali ilmu pengetahuan.¹³

Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.

1. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.

¹³ H.A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Alfa Grafikatama, 1998), 176.

3. Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan keterampilan.
- d. Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
- e. Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
- f. Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia.¹⁴ Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif, dan kritis. Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

¹⁴ Th. Sumartana, et.al., *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 286.

Ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, yakni cara okasional dan sistematis.¹⁵

1. Cara Okasional

Metode ini digunakan dari satu pelajaran dihubungkan dengan bagian dari pelajaran lain bila ada kesempatan baik. Hubungan ini biasanya disebut korelasi. Korelasi dapat dilakukan dengan tiga macam cara,¹⁶ yaitu:

- a. Hubungan antara pelajaran diadakan hubungan insidental, yakni jika ada pertalian dengan mata pelajaran yang lain, misalnya pada pelajaran fisika dapat disinggung soal tauhid.
- b. Hubungan yang lebih erat. Apabila suatu pokok adalah masalah tertentu diperbincangkan dalam berbagai mata pelajaran, misalnya soal sawah atau pertanian dalam pelajaran Fikih dapat dibicarakan dalam pelajaran biologi.
- c. Dapat pula beberapa mata pelajaran disajikan dipisahkan dengan menghilangkan batas masing-masing, misalnya Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, Fikih bisa digabungkan menjadi Pendidikan Agama Islam.

2. Cara Sistematis

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan lebih dahulu bahan-bahan pelajaran berdasarkan rencana tertentu, sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu. Hal ini disebut konsentrasi sistematis.

Demikian mengenai pengintegrasian pendidikan agama kepada pendidikan umum. Semua itu adalah dengan tujuan pementapan sekolah atau madrasah yang dilakukan Departemen Agama. Kita bisa melihat

¹⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 89.

¹⁶ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1993), 95.

SKB 2 Menteri, antara Menteri Agama Nomor 045/1989 dan Menteri P dan K Nomor 0299/V/1989 tentang pembekuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi.

Pendidikan yang Memanusiakan

Manusia diberi oleh Tuhan daya dan kemampuan untuk memilih, tetapi daya dan kemampuan tersebut tidak mutlak. Ia terbatas pada apa yang diberikan (dianugerahkan) Tuhan kepada mereka. Penundukan alam raya untuk manusia tidak mengantarkan manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan mutlak atas langit, bumi, dan fenomenanya.¹⁷ Sekali lagi, walaupun Tuhan tidak memperlakukan manusia dari sini kebebasan dan kemerdekaan sama sepenuhnya dengan langit dan bumi, namun Tuhan tetap bersifat memaksa terhadap manusia. Manusia adalah makhluk yang berpikir (karena mempunyai akal), berpikir merupakan upaya yang muncul dari dalam, yang terjadi secara otomatis, karena itu manusia dapat mengelak bila proses itu berlangsung, paling-paling hanya berupaya mengalikannya, itupun kalau dia berhasil.

Dari statemen di atas dapat dipahami bahwa kebebasan untuk berbuat yang dimiliki manusia bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, karena dalam kehidupannya manusia dikelilingi oleh berbagai macam aturan, undang-undang bahkan nilai-nilai normatif yang terkandung didalam kitab agama yang dianut, yang kesemuannya mempunyai tugas yang sama, yaitu mengantarkan dan memberi koridor dalam kehidupan untuk mencari kebenaran yang ditempuh melalui jalan pendidikan yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia.

Dalam pendidikan liberal sejati, terkandung inti ajaran yang memberi solusi alternatif kepada kita dalam rangka pencarian bentuk, bagaimana kita memandang manusia lain secara sewajarnya (manusiawi), inti ajaran

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Sececah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 326.

tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat harus mempunyai sistem tertentu untuk menyesuaikan anak mudanya dengan lingkungan sosial dan politik yang sudah ada. Ini dapat dipahami bahwa unsur sosial politik suatu negara sangat mempengaruhi terhadap sistem pendidikan suatu negara. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak masuk dalam masalah publik (masyarakat) termasuk pendidikan, sehingga unsur kebebasan di sini mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat, di antaranya, dengan adanya kebebasan untuk berbuat, masyarakat lebih kreatif dan inovatif serta kritis terhadap fenomena alam yang terjadi.
2. Pendidikan menurut pendidikan liberal sejati bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sistem manapun yang mencoba menjadikan manusia lebih buruk bukan pendidikan. Jadi, umpunya, lantaran demokrasi merupakan bentuk masyarakat yang terbaik, sistem yang menyesuaikan kaum mudanya dengan demokrasi adalah sistem pendidikan.
3. Setiap orang mempunyai fungsi sebagai manusia, fungsi seseorang sebagai manusia sama saja di zaman manapun, dalam masyarakat apapun, karena fungsi itu mengemuka dari hakikat sebagai manusia. Sistem pendidikan juga sama saja, yaitu bisa mengada, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan manusia sebagai manusia.
4. Perbaikan masyarakat tidak bisa dilepaskan (dilakukan) dengan program pembaharuan sosial tertentu, akan tetapi perbaikan masyarakat dilakukan melalui perbaikan individu-individu yang membentuk masyarakat itu. Seperti ajaran Plato, “Pemerintah-pemerintah mencerminkan sifat manusia. Negara tidak diciptakan dari batu atau kayu, tetapi dari karakter-karakter para warganya, orang-orang inilah yang menjadi tolak ukur dan segalanya dinilai berdasarkan hakikat mereka.” Individu adalah jantung masyarakat.

5. Manusia secara alamiah bebas, dan secara alamiah pula ia memiliki sifat sosial. Untuk menggunakan kebebasannya secara tepat ia butuh disiplin, untuk hidup dalam masyarakat ia perlu moral yang baik serta kebiasaan intelektual dibutuhkan demi pengembangan hakikat manusia seutuhnya.
6. Jika tujuan pendidikan adalah perbaikan manusia, maka sistem pendidikan apapun yang tanpa nilai-nilai sesuatu yang muskil, suatu pertentangan dalam istilahnya sendiri. Kalau kita bisa mengembalikan nilai kritis dan substansi dasar agama, seperti dalam nilai-nilai Islam *al-'adalah* (keadilan), *al-musauwamah* (egalitarian), *asyuro* (musyawarah), dan *al-khurriatun ikhtiar* (kebebasan memilih) dalam konteks perlindungan harta, perlindungan jiwa, perlindungan agama, perlindungan akal, dan perlindungan keturunan, niscaya tidak ada saling sengketa lagi.¹⁸

Kesimpulan

Pendidikan sebagai alat transfer ilmu pengetahuan, transfer nilai-nilai, dan agen perubahan sosial dipandang sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka perbaikan masyarakat. Pendidikan yang di dalamnya dimasuki nilai-nilai merupakan salah satu upaya yang ditawarkan oleh pendidikan liberal sejati yang bertujuan memberi kepada kita kebiasaan-kebiasaan, gagasan-gagasan dan teknik-teknik yang kita perlukan untuk meneruskan pendidikan diri kita sendiri. Manusia-manusia mampu belajar dan tindakan belajar tidak berhenti selama manusia masih hidup, sehingga kita perlu mempersiapkan diri kita untuk belajar dan belajar lagi seumur hidup kita. Islam pada masa Orde Baru, bahwa masa itu banyak jalan yang ditempuh untuk menyetarakan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini bisa dilihat dari SKB 2 Menteri tentang sekolah umum dan agama. Dengan adanya SKB tersebut, maka anak-anak yang sekolah agama bisa melanjutkan ke

¹⁸ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomi: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 134.

sekolah yang lebih tinggi. Kemudian untuk mengikis dualisme pendidikan bisa dilakukan dengan cara pengintegrasian antara pelajaran umum dan agama, walaupun dualisme itu masalah klasik yang tidak mudah untuk dihapus. Namun, dengan adanya UU tentang Pendidikan bisa diharapkan mempertipis dikotomi pendidikan. Semoga dengan adanya SKB 2 Menteri, dualisme pendidikan bisa berjalan serasi seimbang dan selaras.

Daftar Pustaka

- Depag RI. *Himpunan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1991.
- Djumhur. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Ilmu, 1959.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- “Pesantren Masuk Undang-Undang.” *Majalah Bulanan Rindang*. Edisi XXVII, 2002.
- Fadjar, Malik. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: Alfa Grafikatama, 1998.
- Mas’ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomi: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Sececah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah Kampus*. Bandung: Mizan, 1998.
- Hutehins, Robert Magnard. *Pendidikan Liberal Sejati, dalam Menggugat Pendidikan Fundamintalis Konservatif Liberal Anarkis*. terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Subandijah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 1993.

Sumartana, Th., et.al. *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Syukur, Amin. *Metodologi Studi Islam*. Semarang: Gunung Jati, 1998.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Adzvar, Zainal. “Kebebasan Manusia Menurut Stoa dan Islam.” *Idea*. Edisi 16/X/2001.

Zuhairini, et.al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.